

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

PDIP Minta Riza Jembatani Jokowi-Anies

Koordinasi penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) menjadi tugas awal wakil gubernur baru.

Francisco Rosarians
francisco@tempo.co.id

JAKARTA — Ada pesan khusus dari sejumlah partai di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta kepada Ahmad Riza Patria. Wakil gubernur yang baru terpilih itu diminta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI.

Hal ini merujuk pada sering terjadinya polemik dan silang pendapat antara Gubernur DKI Anies Baswedan dan menteri atau pejabat Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. "Memang itu yang kami minta, saat Riza mengunjungi kami (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPRD DKI)," kata Ketua

Fraksi PDIP Gembong Warsono kepada *Tempo*, kemarin. "Kami menilai Riza bisa mencairkan komunikasi DKI dan pusat."

Sejak menjabat pada Oktober 2017, Anies berulang kali mengeluarkan kebijakan yang kemudian dikonfrontasi para pembantu Jokowi. Akibatnya, sejumlah isu strategis, termasuk penanganan banjir, kerap terhambat. Hal ini juga berlaku dalam penanganan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang menjadikan Ibu Kota sebagai episenter.

Pusat dan DKI, misalnya, berbeda pendapat saat DKI membekukan operasi bus antarkota dari dan ke luar Jakarta untuk menekan laju penyebaran virus *corona*. Pemerintah pusat,

melalui Kementerian Perhubungan yang untuk sementara dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, langsung membatalkan surat edaran tersebut dengan dalih belum ada kajian yang lengkap tentang efek dan penanggulangannya. "Kami harap kebijakan jangan terhenti hanya karena komunikasi yang kurang baik. Riza dan Partai Gerindra pasti bisa berperan," kata Gembong. "Ini untuk warga Jakarta."

Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Prabowo Sunirman, mengakui adanya sejumlah pesan dan tugas titipan kepada Riza saat proses lobi pemilihan calon wakil gubernur. Salah satunya, ya itu

tadi, menjadi jembatan komunikasi yang baik antara pusat dan provinsi.

Riza mengatakan tugas pertama setelah dilantik sebagai wakil gubernur bulan depan adalah membantu Anies dalam penanganan pandemi Covid-19. Dia menyatakan akan segera bertemu dan berdiskusi dengan Anies tentang langkah-langkah pemerintah provinsi menghadapi penyebaran virus asal Wuhan, Cina, tersebut.

"Kami akan sekuat tenaga mendukung



kebijakan pemerintah pusat dan daerah bersama," ujar dia.

Selain *corona*, Riza tak memiliki visi dan misi khusus. Sebagai pengganti Sandiaga Salahuddin Uno, dia menyatakan hanya bertanggung jawab untuk membantu Anies menuntaskan semua program dan janji yang diucapkan saat kampanye pemilihan kepala daerah dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, mengatakan Riza bisa mengambil alih komunikasi antara DKI dan pusat yang selama ini

bermasalah. Menurut dia, kasus Covid-19 tak hanya berefek pada sektor kesehatan, tapi juga ancaman lemahnya perekonomian Ibu Kota. "Kebijakan ini harus ada sinergi antara provinsi dan pusat," kata dia.

Kebon Sirih akan mengirimkan hasil pemilihan wakil gubernur kepada Presiden Jokowi melalui Kementerian Dalam Negeri Gubernur Anies Baswedan berharap Presiden dapat segera melantik Riza, sehingga DKI-2 baru itu dapat segera menjalankan rencana kebijakan yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Saya harap prosesnya bisa cepat tuntas agar mulai bisa bekerja," kata Anies.

● TAUFIQ SIDDIQI LIMAM HAMDI

Ahmad Riza Patria

Lahir: Banjarmasin, 17 Desember 1969

Orang tua: Amidhan Shaberah (Ketua Majelis Ulama Indonesia 1995-2015) dan Rasyidah

Pendidikan: Master in Business Administration Institut Teknologi Bandung, 2008; Teknik Sipil Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta, 1997

Karier:

- 2014-2020 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 2003-2008 Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta
- 1997-2014 Presiden Direktur PT Gala Ariatama
- 1998-2009 Presiden Direktur PT Gala Ray Pratama
- 1998-2003 Principal Ray White Casablanca

Karier politik:

- 2008-sekarang Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra

Kekayaan:

Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2020 sebesar Rp 19,05 miliar, terdiri atas empat bidang tanah dan bangunan senilai Rp 17,2 miliar, tiga mobil senilai Rp 805 juta, harta bergerak Rp 283,2 juta, kas dan setara kas Rp 436,8 juta, harta lainnya senilai Rp 330 juta.

Catatan:

Riza sempat menjadi terdakwa kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di KPUD Jakarta pada 2004 senilai Rp 29,28 miliar. Dia diadili dalam tuduhan penyelewengan kewenangan sebagai Kepala Divisi II KPUD Jakarta. Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Riza dari segala dakwaan karena dinilai kewenangannya hanya mampu mengawasi serta mengkoordinasi penggunaan barang dan jasa di KPUD Jakarta. Berbeda nasib, dalam kasus yang sama, M. Taufik—Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra—divonis bersalah dengan hukuman penjara 18 bulan.

● FRANCISCO ROSARIANS

